



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Letjen S. Parman Nomor 89, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121
Telepon (0331) 337853, Laman bakesbangpoliemberkab.weebly.com
Pos-el : bakesbangpol@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.7 / 35.09.314/2026

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menimbang :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 21 Mei 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Lingga Dimpura, S.Sos
Pembina Tk II IVb
NIP. 19751202 199901 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Instansi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
Tujuan	: Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Fungsi	: - Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; - Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; - Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA (TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL (FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN)	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	a. Indeks Kesalehan Sosial	FORMULASI PERHITUNGAN : $IKS = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks D_j)$ Keterangan: - IKS adalah Indeks Kesalehan Sosial - Indeks Dj adalah Indeks Dimensi ke-j Wj adalah bobot dimensi ke-j Indeks dimensi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:	Bapperida	Bidang Kelahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

NO	KINERJA UTAMA (TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL (FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN)	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
			$Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ij}}{n_j} \right) \times 100$ Penjelasan Indikator : - Indeks Dj adalah Indeks Dimensi ke-j - SXij adalah nilai indikator i pada dimensi ke-j - nj adalah banyaknya indikator dimensi ke-j DEFINISI OPERASIONAL : Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan sikap dan tindakan pemeluk agama dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mencerminkan kepedulian sosial, menghormati keberagaman (kebhinnekaan), berbudi pekerti, menjaga kelestarian lingkungan, dan patuh pada aturan negara serta norma kemasyarakatan, diukur dengan: (1) Solidaritas Sosial (2) Toleransi (3) Ketenteraman dan ketertiban umum/stabilitas		
		b. Indeks Harmoni	FORMULASI PERHITUNGAN : Pengukuran ini dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi hubungan antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan 4 aspek utama yang saling berhubungan dan mempengaruhi tingkat Kondisi Harmoni di Indonesia. Melalui 8 variabel Xi yang terukur, indeks ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi, budaya, dan keagamaan di berbagai daerah. DEFINISI OPERASIONAL : Riset Komprehensif ini terdiri dari beberapa aspek yaitu : • Dimensi Ekonomi : Mencerminkan kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan yang inklusif. • Dimensi Sosial : Menggambarkan interaksi sosial yang sehat,	Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

NO	KINERJA UTAMA (TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL (FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN)	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
			partisipasi masyarakat, serta penguatan peran kelompok sosial tertentu. • Dimensi Budaya : Mengukur bagaimana nilai budaya lokal dan keberagaman dapat hidup berdampingan secara harmonis. • Dimensi Keberagaman : Memastikan keseimbangan antara kebebasan beragama, toleransi, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.		
2	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketahanan dan kondusifitas wilayah	a. Indeks Kerukunan Umat Beragama	FORMULASI PERHITUNGAN : Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan "Riset Kuantitatif", data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka kepada 13.836 responden. DEFINISI OPERASIONAL : Riset Kuantitatif ini terdiri dari beberapa aspek yaitu : • Pendekatan Penelitian : Kuantitatif → menggunakan instrumen survei terstruktur untuk mengukur tingkat kerukunan umat beragama. • Metode Pengumpulan Data : Wawancara tatap muka (face – to – face interview) menggunakan kuesioner terstandar. • Metode Pengambilan Sampel : Multistage Random Sampling with Quota untuk memastikan keterwakilan wilayah dan keseimbangan gender. • Kriteria Responden : Berusia ≥ 17 tahun atau sudah menikah, Berdomisili minimal 6 bulan di lokasi survei, Mewakili 6 Agama yang dilayani di Indonesia • Margin of Error (MoE) : $\pm 1\% - 2\%$ pada tingkat kepercayaan 95%	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

NO	KINERJA UTAMA (TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL (FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN)	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
		b. Persentase Penurunan Konflik Sosial	FORMULASI PERHITUNGAN : $\frac{\text{Jumlah Konflik } n - \text{Jumlah Konflik } n - 1}{\text{Jumlah Konflik } n - 1} \times 100 \%$ DEFINISI OPERASIONAL : • Jumlah konflik n adalah jumlah konflik sosial pada tahun berjalan • Jumlah konflik n-1 adalah jumlah konflik sosial yang terjadi pada tahun lalu	Data konflik diperoleh dari konflik yang terjadi di Kabupaten Jember	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik